

## Pendapatan Retribusi Daerah- Danny Pomanto Geram! Ada Ketua RT/RW Tilep Iuran Sampah Padahal Digaji Segini Tiap Bulan



Wali Kota Makassar Danny Pomanto geram, bakal pecat ketua RT/RW yang terbukti lilep iuran sampah masyarakat.

Sumber gambar:

<https://makassar.tribunnews.com/2024/06/23/danny-pomanto-geram-ada-ketua-rtrw-tilep-iuran-sampah-padahal-digaji-segini-tiap-bulan>

Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) geram dengan kelakuan anak buahnya.

Sejumlah oknum ketua RT/RW malas bahkan ada yang sampai tilep iuran sampah.

Padahal, gaji diterima Pj ketua RT/RW se-Kota [Makassar](#) cukup besar setiap bulannya.

Bahkan per Februari ini, ada kenaikan insentif sebesar Rp200 ribu.

Atas dasar itu, Danny Pomanto akan mengevaluasi Pj Ketua RT/RW di Makassar dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber [Danny Pomanto](#) di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Kemudian, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan iuran sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

Kisaran RT/RW berkinerja rendah hingga tidak aktif mencapai ratusan orang.

Hitungan kasarnya, satu kecamatan sekitar 40 sampai 50 orang diidentifikasi bermasalah.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

"Banyak (yang bermasalah) saya kalau tadi malam laporannya anggaphlah 50-40 orang dikali 15 (kecamatan)," jelasnya.

Jika dikalkulasi, total Pj RT/RW bakal dievaluasi mencapai 600-750 orang.

Danny mengaku telah mengantongi nama-nama RT/RW yang berpotensi diganti.

ali Kota [Makassar](#) [Danny Pomanto](#) geram dengan kelakuan anak buahnya.

Sejumlah oknum ketua RT/RW malas bahkan ada yang sampai tilep iuran sampah.

Padahal, gaji diterima Pj ketua RT/RW se-Kota [Makassar](#) cukup besar setiap bulannya.

Bahkan per Februari ini, ada kenaikan insentif sebesar Rp200 ribu.

Atas dasar itu, Danny Pomanto akan mengevaluasi Pj Ketua RT/RW di Makassar dalam waktu dekat.

"Segera dievaluasi. Akan ada (pergantian). Karena RT/RW ternyata banyak tidak aktif. Saya baru dapat (informasinya)," beber [Danny Pomanto](#) di Balai Kota [Makassar](#) Jl Ahmad Yani, Rabu (19/6/2024).

Selain karena tidak aktif, banyak juga RT/RW mengundurkan diri, bahkan ada tersandung masalah hukum.

Kemudian, beberapa oknum RT/RW bahkan menyelewengkan iuran sampah masyarakat.

"Ada yang mengundurkan diri, ada yang bermasalah hukum, ada yang malas, ada beberapa yang mohon maaf, tilep uang sampah. Diberhentikan itu. Harus diberhentikan," katanya.

Kisaran RT/RW berkinerja rendah hingga tidak aktif mencapai ratusan orang.

Hitungan kasarnya, satu kecamatan sekitar 40 sampai 50 orang diidentifikasi bermasalah.

"Banyak (yang bermasalah) saya kalau tadi malam laporannya anggaphlah 50-40 orang dikali 15 (kecamatan)," jelasnya.

Jika dikalkulasi, total Pj RT/RW bakal dievaluasi mencapai 600-750 orang.

Danny mengaku telah mengantongi nama-nama RT/RW yang berpotensi diganti.

Sementara untuk Februari sementara berproses pencairannya.

"Sekarang kami sementara memproses untuk pencairan Februari. Semoga secepatnya sudah bisa cair juga," kata Husni.

Hal sama disampaikan Camat Biringkanaya, Juliaman juga mengatakan insentif Pj RT/RW untuk Januari sudah dicairkan belum lama ini.

Selanjutnya, dia mengupayakan pencairan insentif untuk Februari dan Maret bisa dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri.

"Menjelang Lebaran, kita upayakan insentif Februari dan Maret juga sudah bisa dicairkan," singkatnya.

Catatan Berita UJDIH BPK Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan/ William Tan

Lain halnya di Kecamatan Rappocini, ternyata belum ada pencairan insentif Pj RT/RW.

Camat Rappocini, Aminuddin berdalih bahwa pencairannya sementara diproses.

Rencananya, insentif Pj RT/RW di wilayah Rappocini akan dicairkan dua bulan sekaligus, yakni Januari dan Februari.

Dia mengatakan, secepatnya insentif tersebut akan dicairkan,

“Sementara proses ini karena kami usahakan dua bulan. InsyaAllah kami upayakan secepatnya,” ujarnya.

### **Kerahkan Inspektorat**

Danny menyampaikan dugaan penyelewengan tersebut sedang diproses di inspektorat.

"Diproses oleh Inspektorat. Baru saya tahu itu Pj RT/RW yang tilep uang sampah," ungkap Danny ditemui di kediamannya Jl Amirullah, Kamis (20/6/2024).

Danny menyampaikan, ia mengetahui masalah itu setelah mendapat laporan dari camat.

Sementara untuk Februari sementara berproses pencairannya.

“Sekarang kami sementara memproses untuk pencairan Februari. Semoga secepatnya sudah bisa cair juga,” kata Husni.

Hal sama disampaikan Camat Biringkanaya, Juliaman juga mengatakan insentif Pj RT/RW untuk Januari sudah dicairkan belum lama ini.

Selanjutnya, dia mengupayakan pencairan insentif untuk Februari dan Maret bisa dilakukan sebelum Lebaran Idul Fitri.

“Menjelang Lebaran, kita upayakan insentif Februari dan Maret juga sudah bisa dicairkan,” singkatnya.

Lain halnya di Kecamatan Rappocini, ternyata belum ada pencairan insentif Pj RT/RW.

Camat Rappocini, Aminuddin berdalih bahwa pencairannya sementara diproses.

Rencananya, insentif Pj RT/RW di wilayah Rappocini akan dicairkan dua bulan sekaligus, yakni Januari dan Februari.

Dia mengatakan, secepatnya insentif tersebut akan dicairkan,

“Sementara proses ini karena kami usahakan dua bulan. InsyaAllah kami upayakan secepatnya,” ujarnya.

### **Kerahkan Inspektorat**

Danny menyampaikan dugaan penyelewengan tersebut sedang diproses di inspektorat.

"Diproses oleh Inspektorat. Baru saya tahu itu Pj RT/RW yang tilep uang sampah," ungkap Danny ditemui di kediamannya Jl Amirullah, Kamis (20/6/2024).

Danny menyampaikan, ia mengetahui masalah itu setelah mendapat laporan dari camat.

Adapun dalam hal tersebut, Siap-siap! Iuran sampah di Kota [Makassar](#) bakal naik.

Pemerintah Kota [Makassar](#) akan memaksimalkan pendapatan yang bersumber dari retribusi sampah.

Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup, jumlah pendapatan retribusi sampah setiap tahunnya diangka Rp35 miliar.

Hal ini tak sebanding dengan subsidi yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk menangani masalah persampahan.

Plt Kepala DLH Kota Makassar Ferdi Mochtar mengatakan subsidi setiap tahunnya untuk penanganan sampah mencapai Rp200 miliar.

Itu mencakup pengadaan hingga pemeliharaan infrastruktur sampah atau transportasi dan alat angkut sampah.

Anggaran Rp200 miliar itu juga sudah termasuk biaya untuk membayar insentif petugas sampah.

Karenanya, Pemkot [Makassar](#) akan melakukan penyesuaian terhadap retribusi sampah.

Sebab, nilai yang ada sekarang ini dianggap sudah tidak relevan.

"Sekarang kota sedang godok perwalinya. Sudah di bagian hukum, dan kita akan bahas teknis bersama tim ahli hukum Pemerintah [Makassar](#)," ucap [Ferdie Mochtar](#), Selasa (25/6/2024).

Kata Ferdi, penyesuaian ini harus dilaksanakan sebab merupakan turunan dari Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang ditetapkan pada 5 Januari lalu.

Rancangan peraturan wali kota tersebut kata Ferdi juga telah dipaparkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

"Perwali ini kami sudah presentasikan di Kemendagri, karena ada keterkaitan dengan retribusi dan angka-angka, itu sudah kita diskusikan sampai di mana dapatkan turunan-turunan, mulai misalnya di tingkat rumah tangga miskin, menengah ke atas yang masing-masing berbeda tarif," paparnya.

Ferdi mencontohkan, retribusi sampah untuk keluarga miskin nilainya Rp25 ribu.

Hal tersebut disesuaikan dengan tarif listriknya, kalau misalnya Rp 900 watt ke bawah, nilainya Rp25 ribu per bulan.

Berdasarkan perwali yang berlaku sebelumnya, tagihan sampah untuk keluarga miskin Rp16 ribu per bulan.

"Jadi ada kenaikan kurang lebih sekitar Rp9.000, tapi kita tetap melihat perkembangan ditingkat masyarakat, makanya nanti ada perbaikan-perbaikan, tentunya kita akan rapatkan dan diskusikan kembali," ulasnya.

"Tapi kita juga melihat seberapa besar kontribusi pelayanan kita terhadap penanganan persampahan yang selama ini banyak di subsidi oleh pemerintah," sambungnya.

Terpisah, Wali Kota [Makassar Danny Pomanto](#) menyampaikan akan melakukan efisiensi terhadap seluruh armada sampah.

Danny merencanakan pembelian armada sampah listrik menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) tahun 2024.

Danny berharap dengan menggunakan armada listrik, tidak ada lagi kebocoran anggaran operasional, khususnya dalam pembelian bahan bakar minyak.

Sehingga tidak ada lagi alasan tidak mengoperasikan armada karena tidak ada BBM.

Selain itu, untuk menghindari kebocoran iuran atau retribusi sampah, pembayarannya akan menggunakan aplikasi Pakinta'.

"Jadi tidak adami lagi yang bisa disalahgunakan. Langsung dibayar pakai Qris menggunakan

Sumber Berita:

1. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/23/danny-pomanto-geram-ada-ketua-rtrw-tilep-iuran-sampah-padahal-digaji-segini-tiap-bulan>
2. <https://makassar.tribunnews.com/2024/06/25/siap-siap-iuran-sampah-di-makassar-bakal-naik-warga-miskin-rp25-ribu-per-bulan>

Catatan:

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 31 ayat (1) yang menyatakan:

Pendapatan asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 30 huruf a meliputi:

- a. pajak daerah;
- b. retribusi daerah;
- c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
- d. lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.